

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kesetaraan Gender

1. Pengertian Gender

Dalam memahami pengertian gender seharusnya terlebih dahulu memahami perbedaan antara gender dengan seks atau jenis kelamin. Pengertian gender menurut Jary dan Jary ada dua pengertian. *Pertama*, kata gender biasa digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan anatomi jenis kelamin. Pada pengertian *kedua* bahwa gender lebih diartikan ke dalam pembagian “*masculine*” dan “*feminime*” melalui atribut-atribut yang melekat secara sosial dan psikologi sosial mengkategorikan kedalam dua kelompok tersebut. Dengan kata lain pengertian gender ini melekat pada sifat-sifat yang dikonstruksi secara sosial, misalnya apabila laki-laki, dianggap lebih kuat, perkasa, jantan, agresif, dan rasional sedangkan perempuan dianggap lemah lembut, cantik, keibuan, pasif dan emosional.¹

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. Sedangkan menurut Kristeva dalam Tong dijelaskan bahwa gender adalah “suatu

¹ Vina Salviana D. Soedarwo, *Modul Sosiologi Gender (Pengertian Gender dan Sosialisasi Gender)*, hal.1.5-1.6.

konsep cultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya”. Gender merupakan aturan atau norma perilaku yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat, karena gender sering kali diidentikkan dengan jenis kelamin atau seks.²

Menurut Muhtar dalam Froom (gender dapat diartikan sebagai “jenis kelamin social atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran social berdasarkan jenis kelamin”. Sedangkan menurut Mansour Fakih “Suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural”.³

Dari beberapa definisi tentang gender dapat ditarik kesimpulan bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik secara kultural dan emosional namun memiliki hak yang sama.

2. Teori-Teori Gender

Teori-teori yang digunakan diadopsi dari teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan. Masalah gender ini banyak diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi. Dalam penjelasan ini akan membahas beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

² Anonim, “*Pengertian dan Definisi Gender*”, dalam <http://kamusq-definisi-gender.com>, diakses 06 Juli 2020.

³ *Ibid.*,

a. Teori Struktural-Fungsional⁴

Teori struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, diantaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons.

Terkait peran gender, pengikut teori ini menunjukkan masyarakat pra industri yang terintegrasi di dalam suatu system sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu dan perempuan berperan sebagai peramu. Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawakan makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Menurut Talcott dan Bales pembagian kerja menurut jenis kelamin merupakan suatu kewajaran, pembagian dengan seimbang hubungan antara suami-istri bisa berjalan dengan baik.

⁴ Marzuki, "Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender", Jurnal Civics, Vol.4, No. 2, Desember 2007, hal. 69.

Teori struktural-fungsional ini mendapat kecaman dari kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktik yang mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Meskipun teori ini banyak memperoleh kritikan dan kecaman, teori ini masih tetap bertahan terutama karena masih didukung masyarakat industri yang cenderung tetap memertahankan prinsip-prinsip ekonomi industry yang menekankan aspek produktivitas. Yang memperkuat pemberlakuan teori ini adalah karena masyarakat modern-kapitalis, menurut Michel Foucault dan Heidi Hartman cenderung mengakomodasi sistem pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Akibatnya, posisi perempuan akan tetap lebih rendah dan dalam posisi marginal, sedangkan posisi laki-laki lebih tinggi dan menduduki posisi sentral.

b. Teori Sosial- Konflik⁵

Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumber daya yang terbatas. Sifat pementingan diri, menurutnya, akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang ada menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lain.

Dalam masalah gender, teori sosial-konflik terkadang diidentikan dengan teori Marx, karena pengaruh Marx didalamnya. Marx yang dilengkapi oleh F. Engels, mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak

⁵ *Ibid.*, hal.71.

disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan laki-laki dan perempuan (suami-istri) tidak ubahnya dengan hubungan ploreter dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemeras dan yang diperas.

Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-olah Engles mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan. Teori sosial-konflik ini juga mendapat kritik dari sejumlah pakar, terutama karena teori ini terlalu menekankan faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Tetapi, teori ini banyak diikuti oleh para feminis modern yang kemudian banyak memunculkan teori-teori baru mengenai feminisme, seperti feminisme liberal, feminisme Marxis-sosialis, dan feminisme radikal.

c. Teori Feminisme Liberal⁶

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan

⁶ *Ibid.*, hal.73.

perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seperti fungsi reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori ini termasuk teori paling moderat diantara teori-teori feminis. Pengikut teori menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja diluar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik.

d. Teori Feminisme Marxis- Sosialis⁷

Berbeda dengan teori sosial-konflik, teori ini tidak terlalu menekankan pada faktor akumulasi modal atau kepemilikan harta pribadi sebagai kerangka dasar ideologinya. Teori ini juga tidak luput dari kritikan, karena terlalu melupakan pekerjaan domestik. Marx dan Engels sama sekali tidak melihat nilai ekonomi pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik hanya dianggap pekerjaan marjinal dan tidak produktif. Padahal semua pekerjaan public yang mempunyai nilai ekonomi sangat bergantung pada produk-produk yang dihasilkan dari pekerjaan rumah tangga, misalnya makanan yang siap dimakan, rumah yang layak ditempati, dan lain-lain yang memengaruhi pekerjaan public tidak produktif. Kalau dinilai dengan uang, perempuan sebenarnya dapat

⁷ *Ibid.*, hal.73-74.

memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dari sector domestic yang dikerjakannya.

e. Teori Feminisme Radikal⁸

Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960-1970-an. Meskipun teori ini hamper sama dengan teori feminisme Marxis-sosialis, teori ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan. Karena keradikalannya, teori ini mendapat kritikan yang tajam dari kalangan sosiolog maupun kalangan feminisme sendiri. Persamaan total antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya akan merugikan perempuan sendiri. Laki-laki yang tidak terbebani oleh masalah reproduksi akan sulit diimbangi oleh perempuan yang tidak bisa lepas dari beban ini.

f. Teori Ekofeminisme⁹

Teori ekofeminisme melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin yang tadinya didominasi oleh laki-laki adalah tidak lagi menonjolkan kualitas femininnya, tetapi justru

⁸ *Ibid.*, hal.74.

⁹ *Ibid.*, hal.74-75.

menjadi tiruan laki-laki dan masuk dalam perangkat system maskulin (dunia publik umumnya) telah menyebabkan peradaban modern semakin didominasi diwarnai oleh kualitas maskulin. Akibatnya yang terlihat adalah kompetisi, dominasi dan eksploitasi.

g. Teori Psikoanalisa¹⁰

Teori ini pertama mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan bahwa kepribadian seseorang disusun atas tiga struktur yaitu, *id*, *ego* dan *superego*. *Id* sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologi sejak lahir. *Ego* bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakan keinginan agresif dari *id*. *Superego* berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian dan selalu menggiatkan *ego* agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol *id*. Menurut Freud kondisi biologis seseorang adalah masalah takdir yang tidak dapat dirubah. Perkembangan kepribadian anak laki-laki dan perempuan melahirkan perbedaan formasi sosial berdasarkan identitas gender.

3. Kesenjangan atau Keadilan Gender

Kesenjangan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sehingga dengan hal ini setiap orang memiliki akses, kesempatan

¹⁰ *Ibid.*, hal.75-76.

berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut. Teori tentang kesetaraan gender terbagi dalam beberapa kajian teori diantaranya adalah:¹¹

a. Teori Nurture

Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsen memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang cenderung mengejar “kesamaan” yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kualitas.

b. Teori Nature

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial, ada pembagian tugas, begitu pula dalam kehidupan keluarga karena tidaklah mungkin sebuah kapal dikomandani oleh dua nahkoda. Talcott Persons

¹¹ Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol.3, No.1, Mei 2015, hal.89.

dan Bales berpendapat bahwa keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan isteri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga.

c. Teori Equilibrium

Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah) dan tidak bersifat universal. Kesetaraan gender dapat terjadi dengan memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasi atau keadaan. Dengan kata lain laki-laki dan perempuan harus bekerjasama karena dalam teori ini ditekankan keharmonisan dalam hubungan laki-laki dan perempuan.

4. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari Gender

Mansour fakih menyatakan bahwa, persoalan gender tidak menjadi masalah selama hal itu tidak menimbulkan ketidakadilan gender: Ketidakadilan ini terjadi pada sistem dalam masyarakat yang berimbas pada kaum laki-laki terutama perempuan. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada, yaitu: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, sub-ordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Berbagai manifestasi ini berhubungan satu dengan yang lainnya, saling mempengaruhi secara dialektis. Berikut beberapa manifestasi ketidakadilan gender menurut Mansour Fakih: ¹²

- a. Gender dan marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan tidak hanya berimbas pada perempuan, tapi laki-laki di sini juga termasuk di dalamnya. Marginalisasi diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pengusuran, bencana alam dan proses eksploitasi. Namun ada juga yang hanya melibatkan kaum perempuan saja, tidak lain sumbernya berasal dari kebijakan pemerintah yang kurang adil, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

¹² *Ibid.*, hal.90-91.

- b. Gender dan sub-ordinasi, berangkat dari pemikiran dan kesadaran gender yang tidak adil. Seperti merendahkan perempuan dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Hal ini mengingatkan pengalaman peneliti di daerahnya, ada salah satu teman yang mengatakan bahwa perempuan akan tetap kembali sebagai kodratnya sebagai perempuan. yaitu menjadi istri dan mengolah permasalahan rumah seperti masalah dapur dan mengasuh anak. Yang dimaksudkan kodrat di sini sangatlah mendominasi bagi kaum perempuan. Dari segi keadilan tentu rasanya tidak adil jika tugas-tugas demikian hanya ditanggung oleh para kaum perempuan yang telah menjadi seorang istri.
- c. Gender dan stereotip, Mansour Fakih mengartikan stereotip sebagai pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Pada permasalahan gender, terdapat ketidakadilan terhadap suatu jenis kelamin tertentu, terutama pada pihak perempuan. Pelabelan ini seperti menyebut perempuan adalah alasan adanya tindakan kriminal seperti pemerkosaan. Sebab cara mereka berpakaian dan bersolek mengundang nafsu para lelaki.
- d. Gender dan kekerasan, tidak sedikit perempuan yang mengalami kekerasan fisik maupun batin yang dilakukan oleh laki-laki. Seperti pernyataan dalam agama bahwa perempuan harus selalu patuh dan tunduk terhadap semua perintah suaminya, hal ini bukan berarti pihak laki-laki dapat semena-mena memperlakukan perempuan atas dasar agama tersebut. Justru dalam agama itu, tunduk adalah bentuk tawadu'

yang dilaksanakan dengan kelembutan dari kedua belah pihak. Mansour fakih juga menjelaskan beberapa macam kekerasan gender antara lain:

Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak dapat terekspresikan disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural, tidak ada pilihan lain.

Kedua, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga. Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anal-anak.

Ketiga, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah, adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar.

Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution), pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di satu sisi pemerintah melerang dan

menangkapi mereka, tetapi di pihak lain negara juga menarik pajak dari mereka.

Kelima, kekerasan dalam bentuk pornografi adalah bentuk kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk jenis kekerasan nonfisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan menjadi objek demi keuntungan seseorang.

Keenam, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana (enforced sterilization).

Ketujuh, adalah jenis kekerasan terselubung (molestation), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum seperti di dalam bis.

Kedelapan, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni dikenal dengan pelecehan seksual atau sexual and emotional harassment. Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang umum terjadi adalah unwanted attention from men. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual itu sangat relatif karena sering terjadi tindakan itu merupakan usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan. Contohnya: meminta imbalan seksual dalam rangka

janji untuk mendapatkan kerja atau untuk mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya.

- e. Gender dan beban kerja, sesungguhnya beban kerja yang dipikul kaum perempuan terutama ibu rumah tangga sangatlah berat. Pekerjaan domestik dalam masyarakat telah menjadi kewajiban bagi kaum perempuan untuk mengerjakannya. Namun, pekerjaan yang berat tersebut tetap saja kurang memberi penghargaan dan perhatian di hati masyarakat yang memandang rendah pekerjaan tersebut. Melimpahkan pekerjaan domestik pada perempuan saja tentulah bukan ide yang baik. Karena dalam pekerjaan ini tanpa doktrinasi dari masyarakat, kaum lelaki harus ikut menanggungnya juga.¹³

B. Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

- a. H. John Bernardin dan Joyce E. A. Russel mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi adalah “Semua orang yang melakukan kegiatan dalam organisasi tersebut. Menurutny segala keputusan yang berdampak pada semua orang yang bekerja pada organisasi tersebut adalah urusan fungsi manajemen sumber daya manusia”.

¹³ *Ibid.*, hal.91.

- b. Gary Dessler mendefinisikan Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai “Semua konsep dan teknik yang dibutuhkan untuk manajemen aspek personalia atau sumber daya manusia dari sebuah posisi manajerial, seperti merekrut, menyeleksi, pelatihan, pemberian imbalan, dan penilaian”.
- c. John M. Ivancevich menyatakan secara singkat bahwa “Pengelola yang efektif dari manusia dalam pekerjaan mereka dan manajemen sumber daya manusia meneliti hal-hal yang dapat atau baru dilakukan untuk menjadikan orang yang bekerja menjadi lebih produktif dan lebih puas.
- d. R. Wayne Monday dan Robert M. Noe mendefinisikan bahwa “Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan asset-aset insani perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang berhubungan dengan organisasi”. Oleh karena itu, menurut Mondy dan Noe. Manajemen sumber daya manusia dalam arti pendayagunaan sumber daya manusia adalah tanggung jawab semua manajer yang mempunyai dan harus memimpin bawahan.

Definisi yang dijelaskan diatas dapat dirangkum menjadi berikut “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penerapan manajemen secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan yang dimiliki oleh sebuah organisasi secara efektif untuk

mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya.”¹⁴

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena manajemen sumber daya manusia semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya manusia. Istilah “manajemen” mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memmanage (mengelola) sumber daya manusia.¹⁵

2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Dengan memahami fungsi manajemen, maka akan memudahkan pula untuk memahami fungsi manajemen SDM yang selanjutnya akan memudahkan kita dalam mengidentifikasi tujuan manajemen SDM. Manfaat apa yang akan diperoleh dari hasil penerapan manajemen SDM dalam suatu perusahaan. Tujuan manajemen SDM ialah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial.

¹⁴ Oemar Hamalik. *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hlm.95.

¹⁵ Veitzhal Rival Zaini (et). all, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal.4.

Tujuan ini menuntun studi dan praktik manajemen SDM yang umumnya juga dikenal sebagai manajemen personalia.

3. Fungsi Manajemen Sumberdaya Manusia

Manajemen SDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan diri pada SDM. Adapun fungsi-fungsi manajemen SDM, seperti halnya fungsi manajemen umum, yaitu:

a. Fungsi Manajerial

- 1) Perencanaan (*Planning*)
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*)
- 3) Pengarahan (*Directing*)
- 4) Pengendalian (*Controlling*)

2) Fungsi Operasional

- a) Pengadaan tenaga kerja
- b) Pengembangan
- c) Kompensasi
- d) Pengintegrasian
- e) Pemeliharaan

2. Prinsip Manajemen Sumberdaya Manusia

- a. Prinsip Kemanusiaan
- b. Prinsip Demokrasi
- c. Prinsip *The Right Man is The Right Place*
- d. Prinsip *Equal Pay for Equal Work*
- e. Prinsip kesatuan arah

f. Prinsip kesatuan komando

g. Prinsip efisiensi.¹⁶

3. Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia

Telah disebutkan tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia adalah meningkatkan kontribusi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi, yang secara sosial dan etis dapat mempertanggungjawabkan. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah sebab seperti yang tersirat tujuannya tidak hanya untuk kepentingan organisasi semata, tetapi lebih luas lagi menyangkut kepentingan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia menghadapi berbagai macam kendala yang dapat bersumber dari luar atau dari dalam organisasi itu sendiri, yang disebut tantangan-tantangan MSDM. Tantangan-tantangan itu secara lebih spesifik bersumber dari:

a. Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal adalah keseluruhan keadaan atau perubahan-perubahan yang bersumber dari lingkungan eksternal yang dapat menyulitkan dan menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia untuk mendukung dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Tantangan ini dapat bersumber dari:

- 1) Keadaan dan perubahan tenaga kerja
- 2) Keadaan dan perubahan teknologi
- 3) Keadaan dan perubahan ekonomi dan persaingan
- 4) Keadaan dan perubahan pemerintahan

¹⁶ *Ibid.*, hal.13.

b. Tantangan Organisasional

Tantangan-tantangan organisasional merupakan elemen-elemen yang berasal dari organisasi, yang dapat mempengaruhi atau berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia.

c. Tantangan Profesional

MSDM memerlukan staf manajemen sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme, keahlian, pengetahuan, tingkat pendidikan tertentu dan juga pengalaman yang cukup. Staf manajemen sumber daya manusia juga dituntut memahami operasi keseluruhan perusahaan, baik operasi internal maupun eksternal.

d. Tantangan Internasional

Dunia bisnis sekarang ini seperti halnya bidang lain, sedang dilanda globalisasi dalam hal ini perusahaan tidak lagi hanya melihat ke dalam dimana perusahaan berada, tetapi harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran produknya dan pelaksanaan proses produksinya. Situasi ini timbul akibat dibukanya batas-batas antarnegara dalam proses pelaksanaan bisnis. Dalam aspek pemasaran, perusahaan melihat ke pasar luar negeri. Untuk alasan efisiensi dan efektivitas dalam mendapatkan beberapa faktor pendukung seperti kesediaan tenaga kerja yang lebih murah dan bahan baku, maka proses produksi dipindahkan ke

luar negeri sehingga banyak perusahaan yang memiliki cabang di luar negeri.¹⁷

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara makro pemberdayaan dapat dipahami sebagai salah satu upaya mengurangi kesenjangan di lapisan masyarakat dengan membangun SDM melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan dan peduli terhadap kesehatan, mendistribusikan modal secara merata serta bersama-sama menyusun perencanaan yang baik untuk melindungi masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat inti dari pemberdayaan adalah:

- 1) Suatu cara atau proses pembangunan yang berkelanjutan, yang berarti dilaksanakan secara sistematis, dan bertahap dimulai dengan tahap pendahuluan hingga tahap kegiatan rencana menindaklanjuti dan evaluasi kegiatan yang terlaksana.
- 2) Suatu cara untuk merombak kondisi ekonomi agar lebih baik, kondisi sosial semakin unggul, dan kebudayaan masyarakat berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas hidup.
- 3) Suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan daya kreatifitas juga untuk memenuhi kebutuhan.
- 4) Suatu upaya memandirikan masyarakat, dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat secara bersama-sama dalam

¹⁷ Andy, *Maksimalkan Kinerja*, (New Delhiz: Gemini Books, 2000), hal.60.

menyelesaikan masalah dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Beberapa cara pandang mengenai pemberdayaan masyarakat. Pertama, pemberdayaan masyarakat merupakan cara yang ditempuh untuk mendirikan sebuah masyarakat. Dalam hal ini posisi masyarakat bukan sebagai obyek yang menggantungkan pendapatannya terhadap masyarakat melainkan masyarakat sebagai subyek yang memposisikan dirinya sebagai partisipan yang berperan aktif dalam mengembangkan potensi, sumber daya dan lingkungannya sendiri.

Kedua, pemberdayaan merupakan kekuasaan yang mempengaruhi masyarakat yang awalnya tidak mampu jadi mampu mengentaskan ketidakmampuan dengan diberi pengawasan.

Ketiga, pemberdayaan terdiri dari segi proses masyarakat sebagai subyek yang akan melakukan sebuah tindakan secara bersama-sama untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya dan kreasi pada masyarakat, memperkuat daya tawar dan membantu meningkatkan perkembangan perekonomian. Dari segi ideal proses yang dicapai harus mengakar dari masyarakat itu sendiri dan didukung oleh peran lembaga atau pemerintah.

Keempat, pemberdayaan terdiri dari beberapa tingkatan psikologi mulai dari anggota masyarakat sampai struktur masyarakat menyeluruh. Pemberdayaan merupakan usaha dalam mengembangkan potensi

masyarakat dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang bertumpu pada sekelompok masyarakat lokal menuju kemandirian masyarakat.

Sedangkan Islam memandang manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berdampingan dengan orang lain, sistem individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Hubungan antar kedua individu atau lebih idealnya bisa saling menguntungkan satu sama lain. Kesenjangan dalam pendapatan ekonomi merupakan sebuah sarana yang memiliki potensi untuk saling merekatkan hubungan *silaturahmi* antar sesama. Seperti yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. [Al-Hujurat] Ayat 10”*¹⁸

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu instrumen penting dalam mengentaskan kemiskinan. Sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin*, Islam mendorong umatnya untuk menegakkan keadilan sosial dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua. Dalam pandangan Islam, program pemberdayaan masyarakat sangat berjalan dengan *spirit dan ruh* Islami yang ingin mencetak pemeluknya menjadi agen penyebar rahmat Allah SWT. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata...*, hal. 516.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.[Al-Anbiya:ayat 107]¹⁹

Pemberdayaan masyarakat harus menerapkan pendekatan dari segi arus keutamaan, untuk memastikan ciri khas pada desa itu sendiri. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya secara sektoral dalam bentuk pelatihan para pekerja maupun pelatihan wirausaha seperti yang dilakukan kementerian terkait, tetapi menghadirkan institusi desa ke ranah pemberdayaan masyarakat, atau merajut kolaborasi antara desa dengan asosiasi pelaku ekonomi desa maupun kerjasama antar BUM Desa dan BUM Desa Bersama dengan institusi ekonomi lainnya.²⁰

2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa tahapan yang direncanakan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Pengembangan masyarakat yang dilakukan diharapkan mampu terealisasi. Menurut Adi tahapan dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan terdiri dari dua hal, yaitu persiapan tim verifikasi dan persiapan turun lapangan. Persiapan tim verifikasi dibutuhkan untuk menyelaskan persepsi antar tim verifikasi sebagai pelaku yang akan terjun langsung di lapangan dalam melakukan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata.*, hal. 331.

²⁰ Pedoman Teknis Tata Cara Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa Bersama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2017), hal.11.

pengembangan masyarakat. Sedangkan persiapan turun lapangan dilakukan dengan menganalisis studi kelayakan dan tim petugas memberikan fasilitas kepada daerah yang dijadikan sasaran, baik secara resmi maupun tidak resmi.

b. Tahap Identifikasi

Tahap yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ingin diimplementasikan dari kelompok yang menjadi sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan.

c. Tahap Perencanaan Kegiatan

Petugas membantu kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada.

d. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar semua warga.

e. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program atau kegiatan yang telah berjalan. Dalam hal ini warga dilibatkan secara langsung dalam proses pengawasan secara internal agar dalam jangka waktu yang panjang dapat memberikan dampak kemandirian terhadap masyarakat. Karena evaluasi ini dimaksudkan untuk memberikan perubahan menuju kebaikan program.

3. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat

- a. Mengerjakan artinya kegiatan pembiayaan masyarakat harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui itu akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- b. Akibat artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik dan bermanfaat karena perasaan senang atau tidak senang akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.
- c. Asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya.

4. Tujuan Pemberdayaan masyarakat

Tujuan pemberdayaan merupakan meliputi beragam upaya perbaikan diantaranya:

- b. Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
- c. Perbaikan aksesibilitas dalam sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan serta lembaga pemasaran.
- d. Perbaikan tindakan diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik.
- e. Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jaringan kemitrausahaan.
- f. Perbaikan usaha diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- g. Perbaikan pendapatan diharapkan akan diperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- h. Perbaikan lingkungan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- i. Perbaikan kehidupan diharapkan memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- j. Perbaikan masyarakat diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.²¹

²¹ Sri Susanti, *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggara Seberang*, (Ejournal Ilmu Administrasi Negara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda, 2015), hal.901-903.

5. Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata pemerintah daerah, dan menciptakan asset untuk kelompok miskin. Program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat dicirikan dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan kegiatan program dilaksanakan oleh masyarakat.²²

a. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan Masyarakat dapat dilakukan dengan tiga pendekatan meliputi:

1) Pendekatan Mikro

Membimbing atau melatih penerima manfaat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

2) Pendekatan Mezzo

Agar penerima manfaat memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3) Pendekatan Makro

Penerima manfaat memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

²² Anonim, *Telaah Kebijakan Kajian dan Bantuan Sosial Bagi Perempuan dan Anak di Keluarga Miskin di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hal.15.

b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat terdapat lima strategi pengembangan yaitu:

- 1) Pengembangan sumberdaya manusia.
- 2) Pengembangan kelembagaan kelompok.
- 3) Pemupukan modal masyarakat.
- 4) Pengembangan usaha produktif.
- 5) Penyediaan informasi tepat guna.²³

D. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

1. Pengertian Pola Pemberdayaan Perempuan

Pola perekonomian pemberdayaan menjadi salah satu program yang menarik dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, Pemerintah tengah gencar untuk menggiatkan program pemberdayaan masyarakat pedesaan, pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi mikro ditengah pasar persaingan bebas, jika masyarakat tidak mampu untuk bersaing di pasar bebas maka hanya menjadi konsumen dalam negeri sendiri. Dengan adanya persaingan pasar bebas maka pemerintah mengambil langkah untuk menghadapinya yaitu salah satunya dengan memberdayakan masyarakat dan memberikan tambahan bantuan modal dan skill, yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mampu bersaing dalam pertumbuhan ekonomi yang semakin tahun semakin cepat.

²³ Ibid., Sri Susanti, *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang*, hal.903.

Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah peningkatan kapasitas bagi perempuan untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pertumbuhan dengan cara mengakui nilai dari kontribusi mereka menghormati martabat mereka dan memungkinkan untuk menegosiasi kontribusi untuk lebih adil. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi perempuan itu sendiri untuk mengatasi kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan dan keluarganya dengan cara meningkatkan penghasilan perempuan dengan melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Seperti memberikan modal usaha, modal simpan pinjam, dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada perempuan agar memiliki potensi dan skill sebagai modal untuk meningkatkan keterampilan.

Pemberdayaan perempuan sudah dilakukan dengan berbagai macam cara diantara yaitu melalui program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Salah satu program unggulannya yaitu akhiri kesenjangan ekonomi, diantaranya menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha, memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan, menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro, dan mengembangkan dukungan dana atau saranan alternatif perempuan inovator.²⁴ Selain program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

²⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Ketahanan Ekonomi Perempuan dalam <https://www.kemennppa.go.id>, diakses pada Selasa, 17 Desember 2019 pukul 08.00 WIB.

pemerintah juga memberikan wadah untuk memberdayakan melalui BUM Desa Bersama dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

2. Konsep Perempuan dalam Perekonomian

Perempuan di Indonesia berperan untuk kemajuan bangsa sudah dimulai sejak masa penjajahan. Pada masa revolusi fisik banyak pejuang perempuan yang bahu membahu dengan laki-laki dalam melawan penjajah. Keterlibatan perempuan baik dalam perjuangan fisik maupun aktif dalam pengurusan logistik maupun menolong para pejuang yang terluka. Saat ini peran perempuan semakin luas, peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya semakin terbuka. Didukung oleh motivasi kaum perempuan untuk bekerja, belajar dan berwirausaha seperti laki-laki tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan.²⁵

Kesempatan yang tersedia perlu didukung dengan adanya peningkatan sumber daya manusia. Untuk bersaing di dalam dunia kerja diperlukan pendidikan dan ketrampilan yang mumpuni. Keterlibatan perempuan dalam pasar kerja dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja semakin banyak pula perempuan yang mampu mengaktualisasikan dirinya dan semakin kecil ketimpangan partisipasi bekerja antara perempuan dan laki-laki pada pasar kerja.²⁶

Partisipasi perempuan yang bekerja meningkatkan peran mereka terhadap pendapatan rumah tangga dan kontrol mereka terhadap alokasi

²⁵ Gaib Hakiki dan Sugeng Supriyanto, *Profil Perempuan Indonesia 2018*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), hal. 47.

²⁶ *Ibid.*, hal. 48.

sumber daya. Hal tersebut dapat mengarah kepada kemandirian ekonomi dan kemampuan menentukan pilihan sendiri, yang mana kedua hal tersebut penting dalam pemberdayaan perempuan.²⁷

3. Pemberdayaan Perempuan

a. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis pemberdayaan berarti kekuatan atau kemampuan. Dapat diartikan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.²⁸

Pemberdayaan menurut Edi Suharto berasal dari “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan ketertinggalan. Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformasi action*) agar perempuan mampu menghasilkan suatu yang bermanfaat.²⁹

Pemberdayaan adalah proses yang dilakukan terhadap masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau kekuatan untuk menentukan pilihan

²⁷ *Ibid.*, hal 58.

²⁸ Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.7.

²⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hal.57.

hidupnya. Pemberdayaan juga ditujukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah atau tertinggal.

Pemberdayaan mengarah pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok yang lemah atau tidak memiliki kekuatan sehingga menjadikan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan serta memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan.³⁰

Pemberdayaan perlu melakukan tiga hal untuk melangkah dalam kegiatan yang berkesinambungan yaitu:

- 1) Pemihakan, artinya yang diberdayakan harus lebih dipihak daripada laki-laki.
- 2) Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
- 3) Perlindungan, artinya memberikan proteksi dan pendampingan sampai dapat dilepas.³¹

Pemberdayaan dapat diawali dengan memberikan dorongan kepada orang agar memainkan peran lebih aktif dalam pekerjaannya, sampai dalam melibatkan mereka untuk mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kegiatan pemberdayaan yang baik di masyarakat pada umumnya mensyaratkan adanya proses pendampingan.

³⁰ *Ibid.*, hal.59-60.

³¹ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.135-136.

Karena objek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dengan dinamika yang beragam.

Pemberdayaan perempuan selaras dengan Islam, karena perempuan dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan laki-laki dalam memikul tanggungjawab beragama, mengokohkan akidah dan ibadah. Islam sudah sangat lama memproklamasikan persamaan derajat antar sesama umat manusia. Allah SWT berfirman:

Q.S. Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

“Wahai manusia Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. (Al-Hujurat: ayat 13).”³²

Ayat diatas menjelaskan persamaan derajat umat manusia, Allah SWT tidak membedakan suatu kaum berdasarkan jenis kelamin, harta dan kekayaan bahwa kemuliaan di sisi Allah SWT hanyalah berdasarkan iman dan takwa. Ayat diatas juga menekankan bahwa perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadikan perpecahan pada suatu kaum, melainkan hal itu menjadi *wasilah* untuk tolong menolong dan saling membantu.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata.*, hal. 517.

b. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

- 1) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti selama ini.
- 2) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksanaan, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- 3) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industry kecil maupun industry besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
- 4) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

c. Strategi Pemberdayaan Perempuan

Tentang peran perempuan yang mulai berkembang yang mulai diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan nasional. Perlu adanya kemandirian oleh kaum perempuan, agar pembangunan mampu dirasakan di berbagai pihak.

Tujuan dari pendekatan ini adalah meningkatkan pada isi produktivitas tenaga kerja perempuan, khususnya terkait pemberdayaan

perempuan, sasarannya adalah kalangan perempuan dewasa. Untuk meningkatkan akses perempuan agar bisa meningkatkan pemberdayaan. Adapun strategi yang dijalankan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, seperti melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan diantaranya menjahit, menyulam, border dan lain sebagainya.³³

4. Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga

Secara etimologis kata wanita berasal dari frasa “Wani Ditoto” atau berani diatur dalam etimologi Jawa. Sebutan wanita didasari dimaknai berdasarkan kemampuannya untuk tunduk dan patuh kepada laki-laki sesuai perkembangan budaya di tanah Jawa pada masa tersebut. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata wanita bermakna perempuan dewasa, yaitu kaum-kaum putri (dewasa).³⁴

Penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa seorang wanita yang telah menikah dan menjalankan pekerjaan rumah tangga, merawat anak dan suaminya, memasak, membereskan rumah, hal itu dapat menggambarkan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga sebagai wanita menikah yang bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Peran ganda seorang ibu (wanita) terutama bagi yang telah menikah lebih ditentukan oleh faktor keinginan sendiri untuk bekerja di luar rumah demi mengatasi keadaan ekonomi rumah tangga yang dirasa kurang mencukupi, sehingga dapat mendorong mereka untuk menambah

³³ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.137-138.

³⁴ Em Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (t.t.p: Difa Publiser, t.t), hal.553.

penghasilan. Ibu rumah tangga berusaha memperoleh penghasilan dalam bekerja disebabkan karena adanya kemauan untuk mandiri dalam bidang ekonomi, yaitu mampu membiayai hidup dengan penghasilan sendiri.

Jika dilihat dari peran perempuan dalam rumah tangga, maka dapat digolongkan:

a. Peran Tradisional

Pada peran ini perempuan harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, mengasuh anak serta segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dalam mengatur rumah serta membimbing dan mengasuh anak tidak dapat diukur dengan nilai uang.

b. Peran Transisi

Perempuan yang juga berperan atau terbiasa bekerja untuk mencari nafkah. Partisipasi tenaga kerja perempuan atau ibu disebabkan karena beberapa faktor, misalnya bidang pertanian, perempuan dibutuhkan hanya untuk menambah tenaga yang ada, sedangkan bidang industri peluang bagi perempuan untuk bekerja sebagai buruh industri khususnya industri kecil yang cocok bagi perempuan yang berpendidikan rendah. Faktor lain adalah masalah ekonomi yang mendorong lebih banyak perempuan untuk mencari nafkah.³⁵

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Nelayan (Studi Kasus di Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)" <http://mbaawoeland.blogspot.com/2011/12/peran-ganda-perempuan.html> di akses pada Rabu, 18 Maret 2020, pukul 22.31 WIB.

c. Peran Kontemporer

Peran perempuan dimana hanya memiliki peran di luar rumah tangga atau sebagai perempuan karier.

Menurut Astuti, dalam peran dan kebutuhan gender peran perempuan terdiri atas:

a. Peran Produktif

Peran produktif hampir sama dengan peran transisi, peran dari seorang perempuan yang memiliki peran tambahan sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarganya. Peran produktif adalah peran yang di hargai dengan uang atau barang yang menghasilkan uang atau jasa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Peran ini diidentikan sebagai peran perempuan di sektor publik, contoh petani, penjahit, buruh, guru, pengusaha.

b. Peran Reproduksi

Pada dasarnya peran produktif hampir sama dengan peran tradisional, hanya saja peran ini lebih menitikberatkan pada kodrat perempuan secara biologis tidak dapat dihargai dengan nilai uang atau barang. Peran ini terkait dengan kelangsungan hidup manusia, contoh peran ibu saat mengandung, melahirkan dan menyusui anak adalah kodrat dari perempuan (Ibu). Peran ini kemudian diikuti dengan kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah.

c. Peran Sosial

Peran sosial pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan dari para ibu rumah tangga untuk mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat. Peran ini lebih mengarah pada proses sosialisasi dari pada ibu rumah tangga.

E. Konsep BUM Desa Bersama

1. Pengertian BUM Desa

BUM Desa merupakan program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi negara Indonesia terutama di desa. Definisi BUM Desa menurut UU desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUM Desa ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui kegiatan yang dilakukan oleh BUM Desa diantaranya simpan pinjam, pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, penyediaan (pupuk, bibit, obat hama dan peralatan pertanian), pemasaran produk dan sebagainya.³⁶

BUM Desa ini didirikan dengan tujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUM Desa ini melalui musyawarah desa, modal yang diperoleh dari kekayaan desa sehingga peran pemerintahan desa sangat penting untuk mengalokasikan dana desa

³⁶ Rohani Budi Prihatin, Mohammad Mulyadi, dan Nur Sholikhah Putri Suni, *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, (Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018), hal. 6.

tersebut. Bagaimana pola pengelolaan alokasi dana desa yang ada, tergantung cara pemerintah desa mampu membangun visi, misi dan bisnis yang jelas. Dari banyaknya jumlah BUM Desa, ada juga BUM Desa yang tidak aktif karena hanya mengharapkan dana modal dari dana desa.

Menurut Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hingga Juli 2018, jumlah BUM Desa diseluruh Indonesia sudah mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di Indonesia. Jumlah tersebut 5 kali lipat dari target Kemendes PDTT yang hanya mematok 5000 BUM Desa. Namun, tidak semua BUM Desa yang terdaftar aktif melakukan kegiatan. Wacana BUM Desa yang masih terbilang baru membuat banyak desa belum siap untuk mengelola dana yang diberikan. Umumnya banyak desa yang masih bingung dalam merumuskan asset dan potensi yang mereka miliki dan bisa menjadi modal BUM Desa itu sendiri. Salah satu sebabnya dikarenakan banyak desa yang berada di wilayah yang berdekatan memiliki potensi yang hampir sama.³⁷

Akan tetapi masalah ini tentu merupakan perkara yang tak perlu dibesarkan, karena antara desa-desa bisa membangun satu kesatuan BUM Desa dengan cara bekerjasama satu sama lain membangun satu lembaga yang dinamakan BUM Desa Bersama. Berbagai keuntungan dan kemudahan akan didapatkan dengan bergabung menjadi BUM Desa Bersama.

³⁷ <http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-BUMDes-yang-harus-anda-ketahui/> diakses pada hari Minggu, 22 Desember 2019.

2. Pengertian BUM Desa Bersama

BUM Desa Bersama dapat dinyatakan sebagai badan usaha yang terbentuk dari dua desa atau lebih, dengan modal seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh desa tersebut. Ditetapkan oleh Peraturan Bersama Kepala Desa dalam Musyawarah Antar Desa. BUM Desa Bersama sangat tepat berada di beberapa desa yang ingin mengembangkan perekonomiannya melalui peningkatan (SDM, Modal, dan Potensi Usaha). Dengan adanya kerjasama ini diharapkan mampu menjamin keberlangsungan dalam mengembangkan dan memfasilitasi unit-unit usaha yang memiliki peluang yang bagus.

Acuan/ regulasi terbentuknya BUMDes dan BUMDesMa yakni: 1) Undang- Undang RI Tahun 2014 Nomor 6 tentang desa; 2) Peraturan Pemerintah RI Tahun 2014 Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa; 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ri Tahun 2015 Nomor 4 tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pengurusan serta Pembubaran BUMDes.

Pendirian BUM Desa Bersama adalah kerjasama antar desa yang dilakukan 2 (dua) desa atau lebih. Dalam pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih. Selanjutnya, Pasal 141 PP No.43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa mengenalkan istilah hukum BUM Desa Bersama.

Pasal 141 PP No. 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 tahun 2015.

- a. Dalam rangka kerja sama antar-desa, 2 (dua) desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa Bersama.
- b. Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- c. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Adapun yang dimaksud dengan pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa:

Pertama, pendirian BUM Desa Bersama. BUM Desa Bersama secara langsung didirikan sebagai BUM Desa untuk memberikan pelayanan usaha antar-desa. Istilah “pendirian BUM Desa Bersama” tidak mensyaratkan terbentuknya BUM desa skala lokal Desa terlebih dahulu, tanpa meninggalkan alas sosial kerjasama antar desa.

Kedua, penggabungan BUM Desa Bersama. BUM Desa Bersama didirikan atas penggabungan BUM Desa skala lokal Desa. Misal Kedua BUM Desa bersepakat untuk bergabung dan menjadi BUM Desa Bersama dengan nama baru, namun kedua BUM Desa tersebut eksistensinya tidak hilang.

Ketiga, Peleburan BUM Desa Bersama. BUM Desa Bersama didirikan atas peleburan 2 (dua) BUM Desa skala lokal Desa atau lebih. Keduanya bersepakat untuk melebur mejadi BUM Desa Bersama dengan konsekuensi pembubaran BUM Desa tersebut.

Tabel. 2.1.

Perbedaan antara BUM Desa dan BUM Desa Bersama

Aspek Pelebagaan	BUM Desa	BUM Desa Bersama
Dasar Hukum	Norma yuridis tentang kelembagaan BUM Desa (<i>vide</i> Pasal 87-90 UU Desa)	<ul style="list-style-type: none"> • Norma yuridis tentang kelembagaan BUM Desa (<i>vide</i> Pasal 87-90 UU Desa) • Alas sosial kerjasama antar Desa, pelayanan usaha antar Desa, BUM Desa yang dimiliki 2 Desa atau lebih (<i>vide</i> Pasal 92 ayat (6) UU Desa). • Kedudukan pengembangan usaha antar –Desa: kawasan pedesaan (<i>vide</i> Pasal 83-85 UU Desa)
	Pengaturan teknis-kelebagaan BUM Desa skala lokal Desa (<i>vide</i> Pasal 132-140 PP No. 43/	Pengaturan khusus tentang BUM Desa Bersama (
Paradigma	Desa Membangun	Membangun Desa
Basis Lokasi	Desa, dekat dengan denyut nadi usaha masyarakat Desa.	Desa yang bersepakat melakukan kerja sama antar Desa.
Prosedur	Musyawarah Desa	Musyawarah antar-Desa atau sebutan lain (Musyawarah Desa Bersama dll).

Sumber: Pedoman Teknis BUM Desa Bersama.³⁸

³⁸ Pedoman Teknis BUM Desa Bersama., hal.7

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai salah acuan peneliti dalam menyusun penelitian yang akan dilakukan, dan juga untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Pemberdayaan Perempuan”. Peneliti akan menyebutkan dan menguraikan tentang tesis, skripsi atau jurnal seseorang yang berkaitan atau mendekati pokok bahasan yang peneliti susun saat ini, diantaranya sebagai berikut:

Pada penelitian yang berjudul *Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Berkah Lestari di Dusun Karangkulon Desa Wukirsari Imogiri Bantul* yang disusun oleh Tri Setyowati pada tahun 2015 menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut tentang pemberdayaan perempuan dilakukan dengan cara melakukan pendampingan melalui dompet dhuafa. Upaya yang dilakukan dengan lima cara yaitu Fasilitas, Motivasi, Sosialisasi, Pertemuan Rutin dan Kemandirian. Perbedaan dari kedua penelitian yaitu penelitian ini meneliti mengenai pemberdayaan perempuan di kelompok kerajinan batik Berkah Lestari, yang pendampingannya melalui dompet dhuafa. Sedangkan persamaannya pemberdayaan perempuan yang dilakukan dipedesaan

dengan memberikan modal usaha kepada perempuan khususnya ibu rumah tangga.³⁹

Pada penelitian dengan judul *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus UPPKS 'Mekar Sari' di Dusun Wonocatur, Banguntapan, Bantul)*, yang disusun oleh Desy Marlina pada tahun 2017, skripsi ini diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini pemberdayaan yang dilakukan oleh UPPKS Mekar Sari melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdiri dari tahapan persiapan, tahap assessment, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Ada dua faktor yang mempengaruhi pemberdayaan anggota UPPKS Mekar Sari, yaitu faktor struktural dan faktor kultural. Perbedaan kedua penelitian ini dari segi obyek yang diteliti, tempat dan fokus dari penelitian ini yaitu pemberdayaan pada program UPPKS. Memiliki kesamaan dalam mengupas tentang peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pemberdayaan perempuan.⁴⁰

Pada penelitian dengan judul *Pemberdayaan Kaum Perempuan oleh Tokoh Masyarakat dalam Menunjang Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Kelompok Wanita Tani Makmur di Kelurahan Surondakan Kabupaten Trenggalek)* yang disusun oleh Astika Suci Wulandari pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian

³⁹ Tri Setyowati, *Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Berkah Lestari di Dusun Karangkulon Desa Wukirsari Imogiri Bantul*, (Yogyakarta: Tesis Tidak Diterbitkan, 2015).

⁴⁰ Desy Marlina, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus UPPKS 'Mekar Sari' di Dusun Wonocatur, Banguntapan, Bantul)*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2017).

ini bahwa banyak kaum perempuan di Surondakan tertarik atas pemberdayaan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. Kendala yang dihadapi dari Internal dan Eksternal. Hasil pemberdayaan kaum perempuan memperoleh omset yang lumayan tinggi, memiliki kemandirian dan secara tidak langsung membuka lapangan kerja. Perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu pemberdayaan perempuan pada penelitian ini dilakukan oleh tokoh masyarakat kepada kelompok wanita tani dengan mendapatkan modal kecil dari Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek. Selain itu para kaum perempuan juga diberi bekal skill untuk membuat produk berupa kue. Sedangkan persamaannya dalam mengupas tentang peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pemberdayaan perempuan.⁴¹

Pada penelitian dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui BUM Desa Srikandi Desa Tunggangri Kalidawir Tulungagung* disusun oleh Binti Isnaul Hasana pada tahun 2019 dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui proses dan tahapan yang dilakukan BUM Desa Srikandi dalam memberdayakan masyarakat yaitu: Menggali potensi desa, membentuk 4 unit usaha, mensosialisasikan BUM Desa Srikandi dan Menyusun rencana-rencana serta unit-unit baru untuk memajukan BUM Desa Srikandi. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pemberdayaan dilakukan kepada masyarakat secara umum yaitu baik laki-laki maupun

⁴¹ Astika Suci Wulandari, *Pemberdayaan Kaum Perempuan oleh Tokoh Masyarakat dalam Menunjang Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Kelompok Wanita Tani Makmur di Kelurahan Surondakan Kabupaten Trenggalek)*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019).

perempuan. Persamaan kedua penelitian ini yaitu pemberdayaan dilakukan melalui BUM Desa yang fokus masalahnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan.⁴²

Pada penelitian dengan judul *Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga* yang disusun oleh Amin Kuncoro dan Kadar pada tahun 2016, jurnal ilmiah ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini kelompok usaha bersama merupakan wadah atau tempat berbagi ilmu tentang pemberdayaan dan kreatifitas warga. Semakin tinggi warga yang bersedia untuk berpartisipasi, maka hasilnya kelompok usaha bersama mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh warga masyarakat di desa Sambiriti, Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Perbedaan kedua penelitian ini yaitu pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui wadah yang dinamakan kelompok Usaha Bersama. Perbedaan juga terletak pada metode penelitian dan teknik pengambilan sampel. Memiliki kesamaan dalam mengupas tentang peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pemberdayaan perempuan secara bersama.⁴³

Penelitian ini dengan judul *Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Home Industri Bulu Mata Sokawera Cilongok Banyumas)* yang disusun oleh Anifatus Solihah pada tahun 2016, dengan

⁴² Binti Isnaul Khasanah, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui BUM Desa Srikandi Desa Tunggangri Kalidawir Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, tahun 2019).

⁴³ Amin Kuncoro dan Kadar, *Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga*, Vol. 1, No. 1, Jurnal Buana Gender LP2M IAIN Surakarta, 2016, hal. 45-54.

menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini: Pertama, pemberdayaan perempuan melalui *Home industry* bulu mata di desa sokawera kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, telah ikut ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga. Kedua pemberdayaan ini, sebagai upaya meningkatkan pendapatan keluarga sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam, diantaranya tidak boleh melalaikan tugasnya di sektor domestik dan mendapatkan ijin dari suaminya. Penelitian ini berbeda dari segi obyek penelitiannya yaitu terhadap perempuan yang memiliki *Home Industry* bulumata di Desa Sokawera Cilongok Banyumas. Penelitian ini juga memandang dari perspektif Islam. Memiliki kesamaan meneliti mengenai pemberdayaan perempuan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.⁴⁴

Pada penelitian berjudul *Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industry Batik Tulis Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas)* yang disusun oleh Marisaty Supriyanti, pada tahun 2017 dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini: Pertama pemberdayaan perempuan melalui *home industry* Batik Tulis di desa Plana kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, telah ikut ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga. Kedua pemberdayaan ini, sebagai

⁴⁴ Anifatus Solihah, *Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Home Industri Bulu Mata Sokawera Cilongok Banyumas)*, (Purwokerto: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 1-77.

upaya meningkatkan pendapatan keluarga sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam, diantaranya tidak boleh melalaikan tugasnya di sektor domestik dan mendapatkan ijin dari suaminya. Perbedaan dari segi obyek penelitiannya yaitu terhadap perempuan yang memiliki *Home Industry* Batik Tulis di Desa Plana kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Penelitian ini juga memandang dari perspektif Islam. Memiliki kesamaan meneliti mengenai pemberdayaan perempuan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.⁴⁵

Pada penelitian yang dengan judul *Pemberdayaan Kaum Perempuan Guna Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada kelompok wanita tani sekarmulia, Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)* yang disusun oleh Dimas Abu Farhan pada tahun 2017 menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa peran serta perempuan sangat membantu meningkatkan pendapatan keluarga, sangat membantu meningkatkan menambah bahkan mempertahankan hidup bagi perempuan dalam kondisi single parent peran perempuan. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa perempuan memiliki dua kategori yaitu kategori rendah hanya bersifat sebagai penambah tidak berpengaruh terhadap pendapatan

⁴⁵Marisatya Supriyanti, *Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industry Batik Tulis Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas)*, (Purwokerto: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017).

keluarga, kategori tinggi karena seluruh pendapatan dikurangi biaya operasional masih memiliki sisa lebih dibandingkan sebelum keterlibatan perempuan, serta membawa implikasi yang positif terhadap sosial ekonomi keluarga. Perbedaan dalam penelitian ini responden dipetakan menjadi dua yaitu responden dengan kondisi single parent dan responden yang masih bersuami. Dan juga ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Memiliki kesamaan dalam mengupas bidang pemberdayaan perempuan. Metode penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode lapangan.⁴⁶

Pada penelitian dengan judul *Peran Perempuan Terhadap Perekonomian Keluarga (Studi Kasus: Pekerja Perempuan di Industri Plastik Rumahan Primajaya Kelurahan Kerukut Kecamatan Limo Kota Depok)* yang disusun oleh Viqih Akbar pada tahun 2017 dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah industri rumahan primajaya plastik mewadahi perempuan untuk bekerja di sana, industri primajaya plastik memperkerjakan perempuan atau ibu rumah tangga, sehingga mereka dapat terbantu secara ekonomi dengan menghasilkan gaji dari bekerja disana. Perbedaan kedua penelitian ini lebih fokus untuk mengetahui peran perempuan tersebut dalam meningkatkan perekonomian keluarganya dan untuk melihat sejauh mana peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarganya itu

⁴⁶ Dimas Abu Farhan, *Pemberdayaan Kaum Perempuan Guna Meningkatkan Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada kelompok wanita tani sekarmulia, Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 1-106.

sendiri dengan bekerja di Industri Plastik Rumahan Primajaya Kelurahan Kerukut Kecamatan Limo Kota Demak. Memiliki kesamaan dalam mengupas bidang pemberdayaan ekonomi perempuan.⁴⁷

Pada penelitian dengan judul *Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)* yang disusun oleh Nika Rizqi Fitriani pada tahun 2016 dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan yang berlangsung di KUB Serang selangkah lebih maju dibandingkan KUB lain di Desa Pulorejo. KUB Serang tidak hanya memproduksi batik dalam bentuk lembaran saja, akan tetapi KUB Serang sudah berani membuat inovasi produk. Perbedaan dalam kedua penelitian ini kegiatan pemberdayaan perempuan dalam kelompok usaha bersama (KUB) Serang. Informan utama dalam penelitian adalah perempuan anggota KUB Serang sedangkan informan pendukung dalam penelitian kepala desa, tutor, keluarga anggota KUB Serang. Memiliki kesamaan dalam mengupas pemberdayaan perempuan yang merupakan salah satu program dari pemerintah.⁴⁸

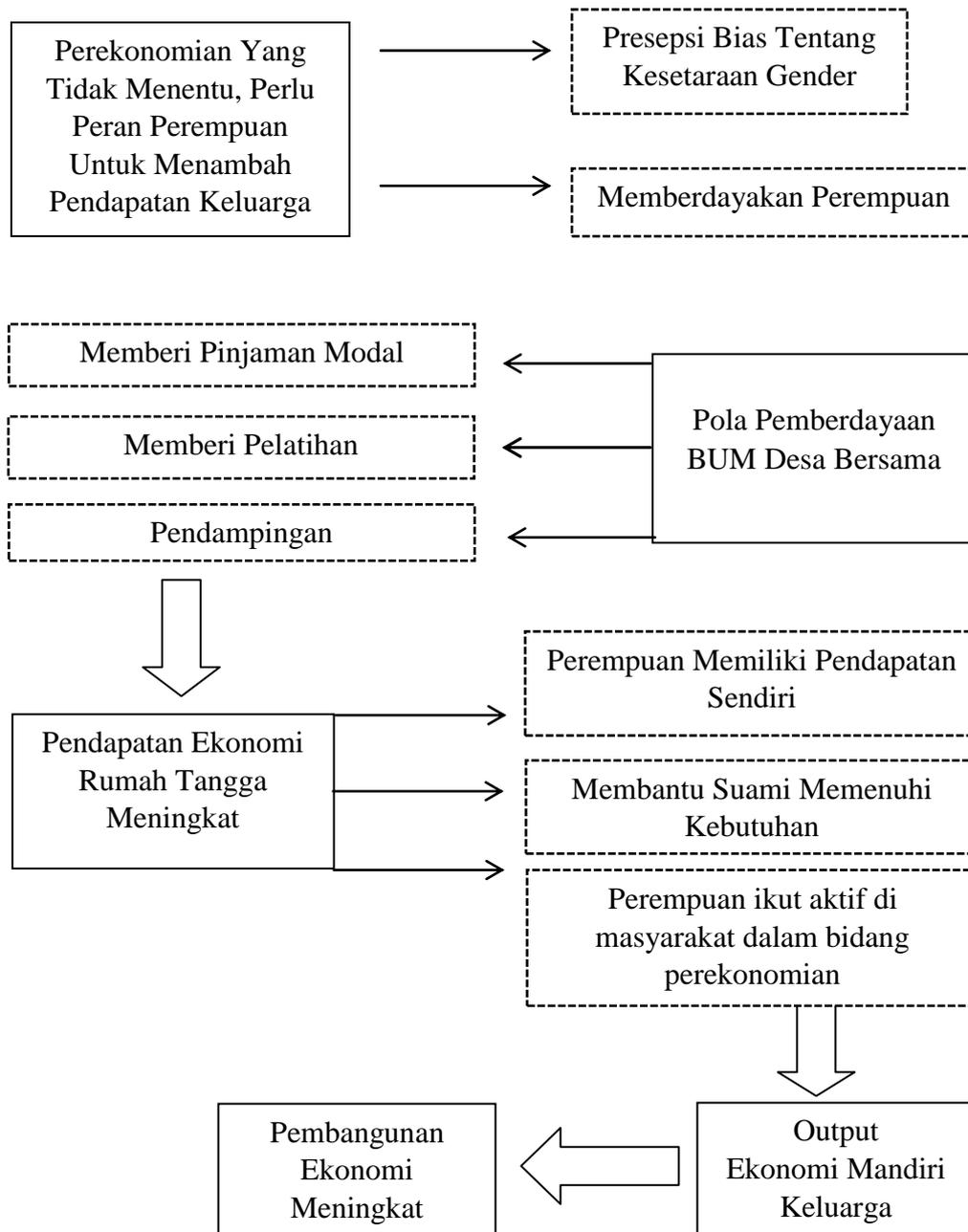
⁴⁷ Viqih Akbar, *Peran Perempuan Terhadap Perekonomian Keluarga (Studi Kasus: Pekerja Perempuan di Industri Plastik Rumahan Primajaya Kelurahan Kerukut Kecamatan Limo Kota Depok)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 1-6.

⁴⁸ Nika Rizqi Fitriani, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 1-90.

G. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual



Sumber: Data Yang Diolah

Berdasarkan Gambar 2.1 menunjukkan bahwa dengan adanya perekonomian yang tidak menentu perlu adanya peran perempuan untuk ikut serta dalam menggerakkan sector perekonomian. Langkah yang perlu dilakukan yaitu sosialisasi mengenai persepsi terkait kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas untuk perempuan agar lebih berdaya. Adapun proses pemberdayaan yang dilakukan meliputi pemberian pinjaman modal, pemberian pelatihan dan pendampingan. Dengan adanya pemberdayaan perempuan ini akan berdampak pada pendapatan ekonomi rumah tangga yang meningkat disebabkan oleh perempuan bisa memiliki pendapatan sendiri, kemudian bisa membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan perempuan lebih memiliki peran aktif di masyarakat dalam bidang perekonomian. Hasil yang diperoleh dari pemberdayaan perempuan yaitu kemandirian ekonomi rumah tangga yang dapat mengurangi angka kemiskinan dan membantu meningkatkan pembangunan nasional.